

KEGAGALAN POLITIK UMNO DALAM PEMILIHAN RAYA UMUM KE - 14

Moh. Nizar

Jurusan Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Lampung
Jalan Prof. Soemantri Brodjonegoro, No. 1, Rajabasa, Bandar Lampung, Indonesia

*Korespondensi: moh.nizar@fisip.unila.ac.id

Received: 13/06/2019 | Revised: 19/09/2019 | Accepted: 25/10/2019

Abstract

Over six decades, UMNO (United Malays National Organization) and its alliance (Barisan Nasional/National Alliance) have ruled Malaysia. Its reign was built and preserved by sectarian ideology based on much more Malay privilege composing 50% than other races and ethnics. Yet, to consolidate its reign, must challenge socio-political tensions, especially racial riot in May 1, 1969. Internal struggle and national political economy tensions have been gnawing the existence of the longest ruling party in the world since thirteenth general election. Mahathir Mohammad, one of the most important figure of UMNO, returned to Malaysian political stage after his resignation during two Malaysian First Premiers, and built a new political party and its new alliance. In Malaysian fourteenth election 2018, UMNO really failed and the longest ruling party in the world fell down. Mahathir and his alliance won the election. The new political communication of information technology was employed to draw support of Malaysian people disappointed and frustrated by the corrupted UMNO.

Keywords: UMNO, ruling party, election, Mahathir Mohammad

Abstrak

Selama lebih dari enam dasawarsa, UMNO (United Malays National Organization) dan koalisinya (Barisan Nasional) menguasai panggung ekonomi politik Malaysia. Kekuasaan ini dibangun atas ideologi sektarian keistimewaan suku Melayu dengan komposisi lebih dari 50% daripada ras, bangsa dan suku lainnya. Namun, penguatan kekuasaan ini berlangsung dengan penuh ketegangan politik, di antaranya yang terpenting adalah kerusuhan rasial pada tanggal 1 Mei 1969. Akumulasi pertentangan internal dan masalah ekonomi politik nasional telah menggerogoti partai berkuasa Malaysia terlama di dunia ini sejak Pilihan Raya ke-13. Mahathir Mohammad, sebagai seorang pembangun UMNO terpenting, memasuki kembali politik Malaysia setelah dua periode Perdana Menteri Malaysia dengan membentuk partai dan koalisi baru. PRU-14 (2018) membuktikan kekalahan UMNO dan kemenangan Mahathir dengan koalisinya. Sarana baru dalam perkembangan teknologi informasi digunakan oleh Mahathir untuk menarik dukungan rakyat Malaysia yang sudah sangat kecewa dan bosan terhadap korupsi kekuasaan UMNO.

Kata kunci: UMNO, partai berkuasa, pemilihan raya, Mahathir Mohammad

61

PENDAHULUAN

Pasca tragedi rasial 1 Mei 1969, pemerintah Malaysia membentuk sebuah undang-undang bahwa hanya Melayu-Muslim yang berhak mendapatkan hak-hak istimewa sebagai Bumiputra (*indigene*) dari mulai sektor bisnis hingga posisi strategis di pemerintahan, sementara non-Melayu yaitu etnik Cina dan India sebagai warga negara kelas dua—mereka tidak mendapatkan hak-hak khusus seperti orang Melayu. Sejak saat itu, anak-anak muda Melayu diberikan kemudahan belajar ke luar negeri melalui peningkatan kuota beasiswa. Berkat kebijakan ini jumlah mahasiswa Melayu yang belajar di luar negeri naik 65 persen antara 1970 dan 1975; dan pada 1979, 66,4 persen, dari semua mahasiswa universitas adalah orang Melayu. Pada 1989, 83,2 persen dari semua mahasiswa yang masuk di program-program gelar sains dan teknologi serta 62,8 persen dari semua yang masuk bidang seni adalah orang Melayu (Hwang, 2010).

Melihat kebijakan Malaysia di atas dapat dikatakan bahwa politik kebangsaan Malaysia unik dengan menjadikan UMNO (*United Malays National Organization*—Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu) sebagai kendaraan politik etnis Melayu (52 persen) dalam menghadapi minoritas

besar etnis China (35 persen) dan minoritas India (10 persen). Dalam konteks sejarah perjalanan politik UMNO, masa-masa yang paling sulit pasca peristiwa 1969 yakni di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Abdullah Badawi (2004-2008). Pada saat itu, pemerintah Malaysia dihadapkan pada berbagai tuntutan ketidakpuasan masyarakat, seperti harga-harga kebutuhan pokok yang terus melonjak, kriminalitas semakin meningkat, korupsi semakin akut, dan orang-orang Melayu mulai tersingkir dalam sektor kerja serta ketegangan-ketegangan etnis mulai mengerah ke arah konflik nasional. Berbagai persoalan tersebut jika dibiarkan berlanjut akan membawa dampak buruk bagi masa depan UMNO/Barisan Nasional (BN).

Dalam konteks di atas, kemerosotan pamor UMNO memberikan kesempatan bagi partai koalisi untuk mencalonkan Anwar Ibrahim sebagai calon Perdana Menteri (PM) Malaysia 2009-2014. Mengingat secara institusi Anwar sudah boleh kembali terjun ke politik pada April 2008 (berdasarkan konstitusi Malaysia seseorang yang pernah dihukum dilarang aktif ke politik termasuk berpartisipasi dalam pilihan raya selama lima tahun). Namun, Pemerintah Malaysia tiba-tiba mengumumkan percepatan Pilihan Raya Umum (PRU) sebelum April 2008. Langkah Badawi ini memupuskan harapan pihak oposisi karena Anwar tidak bisa mencalonkan diri—terganjal peraturan konstitusi. Sehari setelah pembubaran parlemen, Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia (SPR—*Election Commission Of Malaysia*) menetapkan tanggal 8 Maret 2008 sebagai hari pemilihan nasional. Sampai di sini, menjadi jelas bahwa demi mencegah pencalonan Anwar dalam pemilu 2009, Mahathir sengaja menggoyang pemerintahan Badawi untuk mempercepat pilihan raya dari yang semestinya tahun 2009 menjadi tahun 2008.

Namun, dalam suasana PRU-12 yang dipaksakan tersebut, perolehan kursi BN/UMNO menurun tajam dari 198 kursi (2004) menjadi 140 kursi, sementara PAS yang pada pemilu sebelumnya hanya memperoleh 7 kursi meningkat menjadi 23 kursi di parlemen. Dengan terus menurunnya suara UMNO, PRU-13 berikutnya menjadi penentu pertahanan kekuatan politik UMNO yang berkuasa sejak kemerdekaan (1957) Malaysia.

Melemahnya dukungan publik Malaysia terhadap UMNO pada PRU-13 sudah tampak dari hasil publikasi survei “Merdeka Center” yang memperlihatkan penurunan dukungan barisan nasional/UMNO, dan sebaliknya dukungan terhadap oposisi semakin menonjol. Berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan 28 April dan 2 Mei diprediksikan bahwa partai koalisi/Pakatan Rakyat yang terdiri atas Partai Keadilan Rakyat (PKR), Partai Islam Se-Malaysia (PAS), dan Partai Aksi Demokratik (DAP) mendapat kemengangan tipis atas Barisan Nasional/UMNO (<http://www.merdeka.org>). Tapi pendek kata, UMNO/Barisan Nasional tetap unggul dengan meraih 133 kursi dari 222 kursi parlemen, sementara pihak oposisi memperoleh 89 kursi. Dalam waktu 12 jam setelah SPR menyelesaikan perhitungan, dan memastikan Barisan Nasional tampil sebagai pemenang, Perdana Menteri (PM) Najib Razak langsung menjalani pengambilan sumpah jabatan sebagai PM untuk periode kedua.

Meskipun demikian, kemenangan UMNO pada PRU-13 ditentang pihak oposisi dengan tuduhan bahwa UMNO telah melakukan banyak kecurangan, seperti mendatangkan pemilih bayaran di berbagai tempat, dan SPR sengaja menyiapkan tinta yang mudah luntur sehingga memberikan kesempatan pendukung UMNO mencoblos lebih dari satu kali. Dalam konteks ini, walaupun tuduhan kecurangan dan pelanggaran pemilu bukanlah tuduhan baru dalam pemilu Malaysia, namun hal ini menggambarkan semakin beraninya pihak oposisi menentang otoritarianisme pemerintah yang selama ini diharamkan di bawah ancaman undang-undang keamanan ISA (*Internal Security Act*).

Namun, pada PRU-14 (9/5/2018), kekuasaan UMNO akhirnya tumbang dimana partai yang sudah berkuasa selama 61 tahun tersebut kehilangan 40% kursinya dari 222 kursi parlemen. Mahathir Mohammad, Pemimpin koalisi oposisi, Pakatan Harapan berhasil memperoleh suara mayoritas parlemen dengan perolehan kursi sebanyak 112. Terpilihnya Perdana Menteri di luar UMNO adalah yang pertama kali dalam sejarah politik Malaysia, tetapi kalau kita melihat perolehan suara UMNO sejak dua pemilu sebelumnya, posisi UMNO sebenarnya sudah tidak aman. Lebih-lebih pada Pilihan Raya ke-14 koalisi Mahathir Mohammad-Anwar Ibrahim menjadikan Najib Razak sebagai musuh politik bersama.

Dalam konteks ini, pertanyaan yang ingin dijawab dalam artikel ini adalah menjelaskan tentang kegagalan operasi politik UMNO dalam menghadapi pihak oposisi, variable-variable apa saja yang mempengaruhi menurunnya perolehan kursi UMNO/Barisan Nasional, serta bagaimana koalisi Mahathir-Anwar Ibrahim berhasil memenangkan Pilihan Raya ke-14?

Upaya UMNO mempertahankan kekuasaan dalam politik Malaysia melalui dalih-dalih legitimasi kultural kemelayuan inilah yang dimaksud dengan “hegemoni” dalam pengertian Antonio Gramsci. Teori ini dibangun untuk menjelaskan bahwa dominasi satu kelompok atau lebih terhadap kelompok lain dilakukan melalui cara-cara kultural dan intelektual dengan caramelakukan rekayasa-rekayasa kesadaran kritis terhadap rakyat yang dikuasainya, dengan itu kesadaran mereka akan terus mendukung kekuasaan negara (Takwin, 2009).

Dalam pandangan Gramsci, setiap partai politik merupakan ekspresi kelompok sosial, pada konteks ini keberadaan partai politik di Malaysia adalah mewakili setiap kelompok etnik tertentu (*ethnict political competition*) dalam memperjuangkan kepentingan kelompoknya melalui jalur-jalur institusional. Oleh karena itu, pilihan raya di Malaysia adalah tentang kontrol sosial (Hwang, 2010). Selama ini kemenangan UMNO dalam setiap pilihan raya selalu dapat diramalkan, karena meskipun operasi politik UMNO dianggap tidak elok namun mengingat keberadaannya sebagai partai Bumiputera ia tetap berhasil merebut hati pemilih kalangan Melayu sejak era kemerdekaan. Dengan kata lain, komitmen UMNO dalam menyediakan kesejahteraan bagi Muslim Melayu melegitimasi sebagai garda depan pembela kepentingan Bumiputera. Namun, menurut Sugiono (1999) legitimasi politik seperti ini tidak terbentuk dari konsensus massa, melainkan hasil dominasi ideologi kelompok penguasa untuk mencegah timbulnya kesadaran kritis dari kelompok yang dikuasai.

Pendek kata, sebagaimana pandangan Gramsci, karena setiap partai terbentuk mewakili kelasnya, maka hilangnya eksistensi partai dapat terjadi apabila pembagian kelas-kelas tersebut dapat diakhiri, dengan begitu ekspresi partai tidak lagi eksis (Gramsci, 2013). Dalam pandangan ini, selama pembangunan bangsa Malaysia belum dapat mengakhiri permasalahan politik etnik, maka meleburkan partai berbasis etnisitas menjadi partai multi etnik murni sulit diwujudkan. Jadi, meskipun UMNO tidak lagi menjadi partai penguasa, tetapi monopoli etnik Melayu atas pemerintahan tidak akan hilang dengan kemenangan Pakatan Harapan sekalipun.

METODE

63

Untuk memahami dan menjawab pertanyaan penelitian di atas peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif (*qualitative methode*) dengan objek UMNO sebagai unit analisis dan “pemilih” sebagai unit eksplanasi. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah melalui kajian pustaka (*library research*) seperti buku, jurnal, majalah, koran, dokumen, laporan hasil penelitian, atau laporan-laporan resmi. Penelitian ini berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan data-data tersebut sesuai dengan kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini, dan kemudian membuat kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Artikel ini mengambil tema kegagalan operasi politik UMNO dalam PRU-14, yaitu kegagalan salah satu rezim yang paling lama berkuasa di dunia, namun kemudian berhasil ditumbangkan oleh kekuatan oposisi. Pemilihan teori Hegemoni Gramsci sebagai pisau analisis dalam artikel ini karena kemampuannya menjelaskan bagaimana kelompok yang berkuasa dapat melakukan kontrol sosial tidak melalui kekuatan fisik, tetapi bergantung pada kemampuannya dalam menguasai kepemimpinan secara moral dan intelektual. Dengan begitu, krisis hegemoni terjadi ketika kelompok yang berkuasa gagal menguasai kepemimpinan di level ideologis (baca: suprakstruktur). Esensi teori ini adalah pentingnya penguasaan ide atau kepemimpinan moral: kelompok yang berkuasa harus mampu membuat kelompok atau massa lain menerima prinsip-prinsip, ide-ide dan norma atau nilainya sebagai milik bersama (Sugiono, 1999).

Kehidupan politik di Malaysia, meskipun tidak tergolong demokratis, tetapi pemerintah mampu menyediakan kesejahteraan dan peningkatan kesempatan pendidikan—khususnya bagi Muslim-Melayu, sehingga UMNO memperoleh legitimasi sangat tinggi sebagai wakil Bumiputera. Akan tetapi, bagi generasi baru Malaysia kebijakan UMNO yang menekankan pada kesejahteraan sosial dan pendidikan bukan lagi retorika menarik. Tanpa mengabaikan keberhasilan program Dasar Ekonomi Baru (DEP), mereka lebih menaruh perhatian pada isu-isu non material seperti hilangnya Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar untuk bidang ilmu Matematika dan Sains, keadilan, kehakiman, korupsi, kejahatan dan lain sebagainya. Begitu juga

non-Melayu, mereka lebih tertarik pada isu ketuanan Melayu, Agama Islam, dan Kebudayaan dibandingkan isu ekonomi (Mokhtar, 2012).

Dewasa ini, kejatuhan partai rezim hegemoni telah menjadi gejala umum di beberapa negara, diantaranya adalah Partai Golkar (Golongan Karya—1965-1998) di Indonesia, LDP (Partai Liberal Demokrat—1955-2009) di Jepang, SPS (Partai Sosialis Senegal—1960-2000) di Senegal, PRI (Partai Revolusioner Institusional—1929-2000) di Meksiko, INC (Partai Kongres India—1952-1996) India, ANC (Kongres Nasional Afrika—1994-2014) di Afrika Selatan, dan UMNO—1957-2018.

Meskipun diantara partai-partai tersebut secara historis berkontribusi besar terhadap negaranya, namun hal itu bukan lagi jaminan akan terus mampu memenangkan pemilihan di tengah semakin tingginya kesadaran politik pemilih baru. Dengan kata lain, generasi baru telah lebih melek politik dibandingkan pemilih lama. Perubahan ini sebagai akibat globalisasi yang telah melenyapkan batas-batas teritorial *nation-state* dimana berbagai isu-isu politik di berbagai belahan dunia dengan cepat ditangkap generasi baru yang kemudian menjadi inspirasi dilakukan di dalam negeri.

Pada konteks Malaysia, menjelang PRU-13 kalangan etnik dan China serta angkatan muda Malaysia secara terbuka mulai berani menggugat pemerintahan, apalagi isu-isu tentang pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi dan HAM (Hak Asasi Manusia) di kawasan Asia Tenggara menjadi perhatian internasional, dan begitu pula revolusi politik di Timur Tengah (baca: *Arab Spring*) telah mempengaruhi kesadaran politik Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM) tentang pentingnya pemerintahan yang bersih dan demokratis (Saidin2018).

Dengan semakin kuatnya tuntutan publik tersebut, maka kekalahan UMNO telah diprediksi akan terjadi pada PRU-13, apalagi melihat perolehan suara oposisi secara *popular vote* selama dua kali pemilihan berturut-turut selalu di atas angin. Pada PRU-12 (2008) Barisan Nasional kehilangan 2/3 suaranya di parlemen, sementara PAS naik dari 7 kursi (2004) menjadi 23 kursi. Secara *popular vote*, perolehan suara UMNO dengan kelompok oposisi nyaris sama, yaitu UMNO memperoleh 35.5 persen suara sementara koalisi PAS/Keadilan memperoleh 34.8 persen. Menyusul Pilhan Raya ke-13 (2013), suara UMNO kembali turun dari 140 suara (2008) menjadi 133 kursi dari 222 kursi parlemen, sedangkan oposisi naik dari 23 kursi menjadi 89 kursi, secara *popular votes* oposisi kembali memenangi hitungan secara. Hal menarik dari fenomena kemenangan *popular vote* oposisi di atas menggambarkan betapa kritisnya eksistensi hegemoni UMNO, dimana cepat atau lambat kekuasaan dan kekuatan hegemoninya akan tergeser oleh kekuatan oposisi. Hingga akhirnya prediksi tersebut benar-benar terjadi pada Pilhan Raya ke-14.

Pilihan Raya Umum ke-14: Kontestan dan Hasil

Dalam PRU-14 terdapat tiga kekuatan koalisi yang bersaing, yaitu (1) Pakatan Harapan, (2) Barisan Nasional, dan (3) Gagasan Sejahtera. Pertama, Pakatan Harapan terdiri dari gabungan Parti KeAdilan Rakyat (PKR), *Democratic Action Party* (DAP), Parti Pribumi Bersatu Malaysia (PPBM), dan Parti Amanah Negara (Amanah). Kedua, Barisan Nasional (1973) terdiri dari UMNO, *Malaysian Chinese Association* (MCA), *Malaysian Indian Congress* (MIC), Parti Pesaka Bumiputera Bersatu (PBB), Serawak United People's Party (SUPP), Parti Gerakan Rakyat Malaysia (GERAKAN), *People's Progressive Party* (myPP), Parti Demokratik Progresif (PDP), dan Parti Rakyat Serawak (PRS). Ketiga, Gagasan Sejahtera (2016) merepresentasikan koalisi partai Islam, yaitu Parti Islam Se-Malaysia (PAS), Parti Ikatan Bangsa Malaysia (IKATAN), Barisan Jemaah Islamiah Se-Malaysia (BERSAJA), dan Parti Cinta Malaysia (PCM) (Moniruzzaman dan Farzana, 2018). Hasil akhir dari PRU-14 adalah sebagai berikut (Edwards, 2018):

Tabel 1. Hasil Akhir PRU ke 14

Partai/Alinasi	Kursi
PH (PKR, DAP, Bersatu, Amanah)	113
Warisan (Allied to PH)	8
BN (UMNO, MCA, MIC, PBB, SUPP + others)	79
PAS	18
Solidariti	1
Independents	3

Sumber: Edwards (2018)

Faktor-Faktor Kekalahan UMNO-BN

Kekalahan UMNO-BN bisa dianalisa secara ideologis kelembagaan dan faktor patronase. Secara ideologis, UMNO-BN sudah mulai kehilangan popularitasnya selama dua dasawarsa dan mencapai puncaknya pada PRUke-14, karena kasus korupsi yang terlalu besar sehingga memperburuk reputasi UMNO-BN, meskipun korupsi sudah lazim terjadi dalam masyarakat, terutama di panggung politik selama bertahun-tahun. Perbedaannya dalam Pilihan Raya ke-14 adalah kesadaran publik yang lebih besar terhadap skandal *One Malaysian Development Berhad* (1MDB) karena skalanya dalam memperkaya para pemimpin politik UMNO. Skandal korupsi 1MDB membuktikan bahwa UMNO secara kelembagaan tidak mampu lagi membaca dampak dari korupsi para pemimpinnya dalam mendeligitimasi kepemimpinan moralnya sebagai unsur hegemoni di bidang budaya. Najib dan keluarganya sangat kuat terlibat dalam penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Skandal ini terjadi di tengah stagnasi kualitas standar hidup (ekonomi nasional) dan sejumlah kebijakan pemerintahan UMNO yang tidak memenuhi harapan rakyat Malaysia (Edwards, 2018).

Skandal 1MDB menunjukkan kepada rakyat Malaysia bahwa pemerintahan di bawah UMNO sudah tidak bisa diandalkan karena tidak ada penyelidikan terhadap kasus ini. Para anggota senior UMNO yang sudah pensiun menyorot dan mengecam kelemahan sikap pemerintahan terhadap kasus yang mengguncang UMNO ini. Lembaga Anti Korupsi Malaysia (*Malaysian Anti-Corruption Commission*) yang bekerja untuk menyelidiki skandal korupsi ini dinilai sangat lemah, bahkan dikooptasi oleh UMNO, tidak bisa independen. Karena itu, BN tidak lagi bertindak sesuai dengan kepentingan umum dan mengalami deligitimasi publik.

Menurut Noel Meldan, seorang ahli Malaysia dengan Vriens & Partners, sebuah konsultan urusan publik, kekhawatiran mengenai biaya hidup adalah masalah tunggal yang paling menarik bagi warga Malaysia—khususnya bagi 1,4 juta pemilih muda, banyak dari mereka yang merasa semakin cemas tentang ekonomi mereka.

Faktor pendukung dari isu ini tentu saja perkembangan media sosial pada umumnya, tetapi faktor utama tersebut menyebabkan kemerosotan tajam UMNO sebagai pemimpin ideologis politik ketuanan bangsa Melayu sehingga ia sangat mempengaruhi kekalahannya dalam PR ke-14. Dalam kondisi ini, faktor patronase adalah kesadaran sejarah politik publik untuk melihat pembentukan politik UMNO yang sangat berhasil karena peran Mahathir Mohammad.

Dalam politik tidak ada musuh maupun kawan abadi, yang ada hanya kepentingan. Hal ini menjelaskan bahwa dunia politik sangat fleksibel, Mahathir Mohammad dan Anwar Ibrahim yang selama 18 tahun bermusuhan pada akhirnya bertemu untuk menjatuhkan Najib Razak. Sebaliknya, Najib yang pada tahun 2009 naik menjadi perdana menteri Malaysia berkat Mahathir harus melawan sang mentor. Selama ini peran Mahathir sangat besar dalam mempertahankan kekuasaan UMNO, bahkan semua perdana menteri sejak 2004 tidak terlepas dari restu Mahathir. Begitupun dengan keunggulan oposisi, meskipun Pakatan Harapan baru dibentuk tahun 2015, namun pengaruh Mahathir tetap menjadi kunci kemenangan.

Meskipun demikian, Mahathir harus menerapkan strategi taktik yang terukur seperti halnya selama ini diterapkan dalam ekonomi politiknya. Dia menggunakan media sosial untuk menyampaikan pesan-pesan kepada para pendukungnya melalui *Facebook Live* dari Pulau wisata Lengkawi untuk menyampaikan visi misinya kepada 15 juta warga pemilik suara (Kompas, Rabu 9 Mei 2018). Mahathir, kembali menjadi harapan bagi oposisi politik untuk menghadapi Najib. Dia adalah seorang nasionalis Melayu yang gigih yang dapat menarik bagi kelompok etnis terbesar di negara itu, dan yang bertahun-tahun berkuasa dikenang sebagai periode yang makmur dalam sejarah negara itu.

Media sosial dan platform digital memainkan peran utama dalam menentukan pemenang dalam pemilihan bersejarah ini. Malaysia memiliki tingkat penetrasi smartphone lebih dari 75%, dengan lebih dari 40% dari 15 juta pemilih di negara itu berusia di bawah empat puluh— artinya sebagai “penduduk asli digital,” mereka mendapatkan berita mereka hampir secara eksklusif melalui media sosial. Facebook, Twitter, dan YouTube adalah platform utama, dengan 97% pengguna media sosial aktif di Facebook, yang menjadikan Malaysia salah satu negara yang paling terhubung secara digital dan mengerti internet. Dampak menyeluruh dari AI dan analitik data memungkinkan koalisi Mahathir-Pakatan Harapan—untuk menargetkan pemilih tertentu dengan akurasi laser melalui media sosial.

PENUTUP

Jadi, mengikuti perjalanan politik Malaysia sejak PRU-12 (2008) kegagalan UMNO dalam PRU-14 tidak mengagetkan penulis. Dengan kata lain, perolehan kursi UMNO yang terus merosot menggambarkan betapa kritisnya hegemoni politik UMNO, khususnya di kalangan generasi muda Malaysia. Dalam hubungan ini, pada PRU-14 Mahathir memanfaatkan media sosial dan platform digital untuk memenangi hati pemilih muda. Lewat media ini: isu penyelewengan dana IMDB menjadi isu nasional yang mampu merebut hati pemilih muda untuk memilih Pakatan Harapan.

Walhasil, UMNO yang sebelumnya mampu memainkan peran-peran simbolik sebagai pelindung Melayu menjadi tidak berdaya di hadapan pemilih Malaysia yang semakin kritis dan kecewa terhadap skandal korupsi kekuasaan UMNO. Pada PRU-14, ketidakpuasan ini mendapatkan momentum yang tepat ketika Mahathir merasa terpanggil menyelamatkan Malaysia. Hal ini bertambah berat bagi UMNO: operasi-operasi politiknya sulit membendung kekuatan oposisi baik itu di dunia maya maupun dunia nyata. Hingga akhirnya, UMNO benar-benar harus menerima kekalahan untuk yang pertama kalinya dalam sejarah perebutan kekuasaan politik Malaysia.

DAFTAR PUSTAKA

- Edwards, S. 2018. "Malaysia's Elections: Corruption, Foreign Money, and Burying-the-Hatchet Politics", *Al Jazeera Centre for Studies*, June 10, 2018.
- Gramsci, A. 2013. *Prison Notebooks: Catatan-Catatan Dari Penjara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hwang, Julie Chernov. 2010. "*Umat Bergerak: Mobilisasi Damai Kaum Islamis di Indonesia, Malaysia, dan Turki*". Jakarta: Freedom Institute.
- Kompas Online. 2018. "*Pemilu Malaysia, Pertarungan Dua Raksasa Politik Semenanjung Malaya*", Rabu 9 Mei 2018, PKL. 10: 42 WIB. Dikutip dari <http://internasional.kompas.com>.
- Mokhtar, M., Sidik, N.M.S.W.M., Yunus, A.S., Samsi., A.H., Harun., M.R., 2012. "Inovasi Politik di Malaysia: Keperluan atau Kehendak?". Makalah disampaikan dalam *RECCNI 2012 (Regional Conference on Cross Cultural Communication and National Integration 2012 (19-21))*, Kuala Lumpur: Malaysia. Sumber online diperoleh dari <https://www.researchgate.net/publication/320842619InovasiPolitikdiMalaysiaKeperluanatauKehendak>.
- Sugiono, M. 1999. *Kritik Antonio Gramsci terhadap Pembangunan Dunia Ketiga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Saidin, M.I. S., 2018. "Persepsi dan Pengaruh Arab Spring terhadap Gerakan Angkatan Belia Islam Malaysia", *Jurnal Akademika* 88 (1), April 2018: 91-106
- Takwin, B. 2009. *Akar-Akar Ideologi: Pengantar Kajian Konsep Ideologi dari Plato hingga Bourdieu*. Yogyakarta: Jalasutra.